

# Gema Islam

Digitalisasi oleh Penggiat Buku



# PERPISAHAN AGAMA dan NEGARA

Oleh: Mr Mohamad Roem

Soal perpisahan agama dan negara bukan persoalan jang baru. Sedjak umat manusia mengetahui arti dari dua perkataan itu, atau lebih djelas umat manusia beragama dan bernegara, persoalan itu senantiasa menggerakkan pikiran manusia. Mau atau tidak mau kita dipaksa mendudukkan tiap<sup>2</sup> dari artinja di tempat jang wadjar, sesuai dengan pengertian dan kemampuan kita pada suatu saat.

Kadang<sup>2</sup> atau sering pengertian dan pendapat kita berlainan dengan apa jang sedang berdjalanan dalam hubungan agama dan negara, dan kita menganggap pendapat kita sudah benar, sedangkan jang sedang berdjalanan hidup terus. Kita tidak merasa perlu menindau kembali pendapat kita jang lain dengan jang sedang berdjalanan itu.

Saja menjadari benar<sup>2</sup>, bahwa saja dalam kuliah umum ini tidak memajukan soal jang baru jang sangat menarik hati, bahkan soal jang lama jang rupanya akan tetap menjadi soal selama umat manusia beragama dan bernegara. Hanja sadja baru<sup>2</sup> ini soal ini di Amerika menjadi soal jang sangat lagi. Karena kita sekarang ini sedang asjik bernegara dan kita adalah suatu bangsa jang sangat kuat beragama, meskipun dengan sedikit ragu<sup>2</sup>, saja kira soal itu dapat saja sadjikan sebagai atjara dalam kuliah umum ini.

Waktu Kennedy dua tahun jang lalu muntjul sebagai tjalon partai Demokrat dalam pilihan Presiden Amerika Serikat soal hubungan atau perpisahan Agama dan Negara ini timbul kembali dengan hebat. Sebagai kita ketahui, Kennedy seorang beragama Katholiek jang achirnya terpilih menjadi Presiden. Ia seorang Katholiek jang pertama kali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Apa sebab soal ini muntjul dan menjadi pertentangan jang hebat pada waktu itu? Karena agama Katholiek dalam peladjarannya pada pokoknya berdiri pada asas, bahwa agama dan negara itu bersatu, tidak boleh terpisah, bahwa siapa jang berkuasa dalam agama, berkuasa dalam negara.

Vatikanstad adalah suatu tjontoh jang murni dari persatuan agama dan negara. Vatikanstad merupakan suatu negara dalam arti jang modern. Ia mempunjai wilayah, mempunjai pendukuk dan mempunjai pemerintah. Ia mengirimkan wakil<sup>2</sup>nja ke-negara<sup>2</sup> lain dan menerima wakil<sup>2</sup>nja dari negara lain itu. Indonesia mempunjai wakil pada Vatikanstad jang berpangkat duta. Di Djakarta berdiri wakil Vatikanstad dengan pangkat internusius.

Dalam diri Paus didjelmakan persatuan agama dan negara. Dalam soal<sup>2</sup> kenegaraan ia menjadi kepala eksekutif. Ia menjadi Kepala Agama jang menurut doktrin Katholiek menentukan apa jang harus menjadi

\*) Kuliah umum diutjapkan pada pembukaan Perguruan Tinggi Sjarif Hidayatullah, Tjeribon, tanggal 22 Nopember 1961.

kepertjajaan umat Katholiek. Dengan singkat Paus dalam kekuasaannya mempersatukan otoriteit jang menentukan nasib ummatnya baikpun di dunia maupun diachirat.

Selama kampanje pemilihan Presiden Amerika Serikat jang baru lalu, persoalan itu menjadi hangat dan merupakan pertentangan jang hebat. Meskipun pertentangan itu sebagian besar disebabkan oleh maksud<sup>2</sup> politik, jaitu agar djangan Kennedy dipilih menjadi Presiden, akan tetapi kita dapat juga mengambil alasan<sup>2</sup> jang benar, jang merupakan usaha sungguh<sup>2</sup> untuk mendudukkan soal itu dengan sewadjarnya, jaitu bagaimana perpisahan atau hubungan agama dan negara itu harus diatur, agar masing<sup>2</sup> mempunjai dan menunaikan fungsinya dengan sebaik<sup>2</sup>nja.

Sudah barang tentu sanggahan terhadap tjalon Kennedy itu terutama datangnya dari pihak Protestan, jang seperti terjantum dalam namanja dalam riwayat agama Nasrani muntjul menjadi golongan sendiri karena memprotes kekuasaan Paus jang memegang otoriteit baik mengenai soal<sup>2</sup> kenegaraan maupun mengenai soal kepertjajaan.

Salah seorang jang menentang penjalonan Kennedy, jalah Bishop Episcopal Protestan dari California, jaitu the Right Reverend James A. Pike. Ia bentangkan sanggahan<sup>2</sup> itu dalam buku jang ia karang, berjudul : „A Catholic in the White House?”, „Seorang Katholiek di Gedung Putih?”.

Bishop James A. Pike mengemukakan, bahwa berkenaan dengan doktrin agama Katholiek soalnya menjadi terlalu penting untuk dibiarkan sadja. Soalnya ialah dimana letaknya kesetiaan seorang Presiden jang beragama Katholiek. Begitu pula penting untuk ditunjakan, bagaimana pendirian Presiden tentang hubungan geredja dengan negara.

Kata Bishop James A. Pike, marilah kita singkirkan dulu faktor purba sangka. Kita tidak boleh berkeberatan terhadap tjalon seorang Katholiek, semata<sup>2</sup> karena agamanja. Akan tetapi ada perbedaan jang sangat besar antara menentang tjalon seorang Katholiek karena agamanja dengan menentang tjalon itu karena agamanja dapat mempengaruhi kemampuan untuk menduduki sesuatu djabatan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa tjontoh. Ada segolongan orang Kristen jang disebut golongan Christian Scientist.

Golongan ini mempunjai kepertjajaan bahwa semua penjakit dapat diobati dengan berdo'a atau bersembahyang. Orang tidak boleh keberatan terhadap seorang jang menjadi seorang Christian Scientist, karena U.U.D. mendjamin kebebasan beragama. Akan tetapi orang dapat berkeberatan terhadap seorang Christian Scientist tulen jang menjadi Menteri Kesehatan.

Ada lagi suatu golongan orang Kristen jang dinamakan Quakers. Golongan

ini prinsipiil anti menggunakan kekerasan, seperti Mahatma Gandhi jang berkejakinan, bahwa kekerasan tidak boleh dipergunakan. Bagaimanakah djika seorang Quaker menjadi Menteri Pertahanan? Terhadap tjalon Kennedy pada waktu itu dikemukakan pertanyaan bagaimana pendapatnya tentang birthcontrol, pengaturan atau pembatasan kelahiran. Menurut doktrin Katholiek birth-control adalah se suatu tindakan jang terlarang.

Untuk memahami soal perpisahan agama dengan negara lebih lanjut, ada baiknya djika kita lihat bagaimana soal itu dimasa jang lampau. Maka adalah dua pandangan, dua<sup>2</sup>nja agak extreem. Dalam riwayat umat manusia kita menemui dua djenis hubungan ini dengan saling berganti.

Pertama hubungan, dalam mana negara berkuasa diatas geredja.

Di negara<sup>2</sup> Komunis, geredja sepenuhnya dikuasai oleh negara, malahan geredja dipergunakan sebagai alat propaganda dari negara.

Disamping itu ada hubungan antara negara dan geredja, dimana negara mempunjai kekuasaan atas geredja, meskipun hanja tinggal simbolis sadja. Ratu Inggeris masih mempunjai kedudukan sebagai Kepala dari „The Church of England”. Dalam nama resmi jang pandjang masih dapat dibatja, bahwa ia „Defender of the faith” pembela agama. Bishop<sup>2</sup> dari The Church of England diangkat oleh Radja.

Ketika pada tahun 1570 timbul perselisihan antara Paus Pius V dengan Ratu Elizabeth I dari Inggeris, maka Paus Pius tarik kembali penobatan jang telah dilakukan olehnya. Ini dapat diartikan, bahwa Paus membebaskan rakjat bawahan Ratu Elizabeth daripada kesetiaan kepada ratunya. Bagi orang Inggeris jang pada waktu itu menjatakan persetujuan untuk Geredja Roma, timbullah satu situasi jang sangat gawat. Mereka menjadi pengchianat, kalau tidak terhadap negaranya, terhadap geredjanja. Tidak ada alternatif lainnya.

Dalam doktrine agama Katholiek memang ada suatu principe, bahwa Paus mempunjai kedaulatan atas jang berkuasa didunia, dan principe ini tidak pernah ditjabut, sehingga kemungkinan perselisihan sematjam itu tetap masih ada.

Dalam kalangan umat Katholiek sendiri ada dua pendapat tentang hubungan geredja dan negara, jang satu bertentangan dengan Konstitusi Amerika, jang lainnya tidak.

Pertama: pendapat resmi. Pendapat ini jang paling tua. Ditahun 1864 Paus Pius IX dalam peraturannya jang berjudul Syllabus of Errors ia mengutuk perpisahan agama dan geredja. Paus menjatakan, bahwa adalah salah, djika orang berusaha untuk melepasan pelajaran umum dari pengawasan geredja, bahwa adalah salah, djika orang berpendirian, bahwa tiap orang bebas untuk mengakui dan memeluk agama jang ia pertajai. Ia menjesalkan, bahwa dibeberapa negara Katholiek, Pemerintahnja membiarkan warga-negaranya mengamalkan dengan setjara umum agamanja menurut kejakinan masing<sup>2</sup>.

Benar, kata Bishop James A. Pike, semua itu dinjatakan seabad jang lalu. Tapi dapatlah kita lupakan? Djika itu

# PERPISAHAN AGAMA dan NEGARA

Oleh: Mr Mohamad Roem

Soal perpisahan agama dan negara bukan persoalan jang baru. Sedjak umat manusia mengetahui arti dari dua perkataan itu, atau lebih djelas umat manusia beragama dan bernegara, persoalan itu senantiasa menggerakkan pikiran manusia. Mau atau tidak mau kita dipaksa mendudukkan tiap<sup>2</sup> dari artinja di tempat jang wadjar, sesuai dengan pengertian dan kemampuan kita pada suatu saat.

Kadang<sup>2</sup> atau sering pengertian dan pendapat kita berlainan dengan apa jang sedang berdjalanan dalam hubungan agama dan negara, dan kita menganggap pendapat kita sudah benar, sedangkan jang sedang berdjalanan hidup terus. Kita tidak merasa perlu menindau kembali pendapat kita jang lain dengan jang sedang berdjalanan itu.

Saja menjadari benar<sup>2</sup>, bahwa saja dalam kuliah umum ini tidak memajukan soal jang baru jang sangat menarik hati, bahkan soal jang lama jang rupanya akan tetap menjadi soal selama umat manusia beragama dan bernegara. Hanja sadja baru<sup>2</sup> ini soal ini di Amerika menjadi soal jang hangat lagi. Karena kita sekarang ini sedang asjik bernegara dan kita adalah suatu bangsa jang sangat kuat beragama, meskipun dengan sedikit ragu<sup>2</sup>, saja kira soal itu dapat saja sadjikan sebagai atjara dalam kuliah umum ini.

Waktu Kennedy dua tahun jang lalu muntjul sebagai tjalon partai Demokrat dalam pilihan Presiden Amerika Serikat soal hubungan atau perpisahan Agama dan Negara ini timbul kembali dengan hebat. Sebagai kita ketahui, Kennedy seorang beragama Katholiek jang achirnya terpilih menjadi Presiden. Ia seorang Katholiek jang pertama kali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Apa sebab soal ini muntjul dan menjadi pertentangan jang hebat pada waktu itu? Karena agama Katholiek dalam peladjarannya pada pokoknya berdiri pada asas, bahwa agama dan negara itu bersatu, tidak boleh terpisah, bahwa siapa jang berkuasa dalam agama, berkuasa dalam negara.

Vatikanstad adalah suatu tjontoh jang murni dari persatuan agama dan negara. Vatikanstad merupakan suatu negara dalam arti jang modern. Ia mempunjai wilayah, mempunjai pendukuk dan mempunjai pemerintah. Ia mengirimkan wakil<sup>2</sup>nja ke-negara<sup>2</sup> lain dan menerima wakil<sup>2</sup>nja dari negara lain itu. Indonesia mempunjai wakil pada Vatikanstad jang berpangkat duta. Di Djakarta berdiri wakil Vatikanstad dengan pangkat internusius.

Dalam diri Paus didjelmakan persatuan agama dan negara. Dalam soal<sup>2</sup> kenegaraan ia menjadi kepala eksekutif. Ia menjadi Kepala Agama jang menurut doktrin Katholiek menentukan apa jang harus menjadi

kepertjajaan umat Katholiek. Dengan singkat Paus dalam kekuasaannya mempersatukan otoriteit jang menentukan nasib ummatnya baikpun di dunia maupun diachirat.

Selama kampanje pemilihan Presiden Amerika Serikat jang baru lalu, persoalan itu menjadi hangat dan merupakan pertentangan jang hebat. Meskipun pertentangan itu sebagian besar disebabkan oleh maksud<sup>2</sup> politik, jaitu agar djangan Kennedy dipilih menjadi Presiden, akan tetapi kita dapat juga mengambil alasan<sup>2</sup> jang benar, jang merupakan usaha sungguh<sup>2</sup> untuk mendudukkan soal itu dengan sewadjarnya, jaitu bagaimana perpisahan atau hubungan agama dan negara itu harus diatur, agar masing<sup>2</sup> mempunjai dan menunaikan fungsinya dengan sebaik<sup>2</sup>nja.

Sudah barang tentu sanggahan terhadap tjalon Kennedy itu terutama datangnya dari pihak Protestan, jang seperti tertjantum dalam namanja dalam riwayat agama Nasrani muntjul menjadi golongan sendiri karena memprotes kekuasaan Paus jang memegang otoriteit baik mengenai soal<sup>2</sup> kenegaraan maupun mengenai soal kepertjajaan.

Salah seorang jang menentang penjalonan Kennedy, jalah Bishop Episcopal Protestan dari California, jaitu the Right Reverend James A. Pike. Ia bentangkan sanggahan<sup>2</sup> itu dalam buku jang ia karang, berjudul : „A Catholic in the White House?”, „Seorang Katholiek di Gedung Putih?”.

Bishop James A. Pike mengemukakan, bahwa berkenaan dengan doktrin agama Katholiek soalnya menjadi terlalu penting untuk dibiarkan sadja. Soalnya ialah dimana letaknya kesetiaan seorang Presiden jang beragama Katholiek. Begitu pula penting untuk ditunjakan, bagaimana pendirian Presiden tentang hubungan geredja dengan negara.

Kata Bishop James A. Pike, marilah kita singkirkan dulu faktor purba sangka. Kita tidak boleh berkeberatan terhadap tjalon seorang Katholiek, semata<sup>2</sup> karena agamanja. Akan tetapi ada perbedaan jang sangat besar antara menentang tjalon seorang Katholiek karena agamanja dengan menentang tjalon itu karena agamanja dapat mempengaruhi kemampuan untuk menduduki sesuatu djabatan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa tjontoh. Ada segolongan orang Kristen jang disebut golongan Christian Scientist.

Golongan ini mempunjai kepertjajaan bahwa semua penjakit dapat diobati dengan berdo'a atau bersembahyang. Orang tidak boleh keberatan terhadap seorang jang menjadi seorang Christian Scientist, karena U.U.D. mendjamin kebebasan beragama. Akan tetapi orang dapat berkeberatan terhadap seorang Christian Scientist tulen jang menjadi Menteri Kesehatan.

Ada lagi suatu golongan orang Kristen jang dinamakan Quakers. Golongan

ini prinsipiil anti menggunakan kekerasan, seperti Mahatma Gandhi jang berkejakinan, bahwa kekerasan tidak boleh dipergunakan. Bagaimanakah djika seorang Quaker menjadi Menteri Pertahanan? Terhadap tjalon Kennedy pada waktu itu dikemukakan pertanyaan bagaimana pendapatnya tentang birthcontrol, pengaturan atau pembatasan kelahiran. Menurut doktrin Katholiek birth-control adalah se suatu tindakan jang terlarang.

Untuk memahami soal perpisahan agama dengan negara lebih lanjut, ada baiknya djika kita lihat bagaimana soal itu dimasa jang lampau. Maka adalah dua pandangan, dua<sup>2</sup>nja agak extreem. Dalam riwayat umat manusia kita menemui dua djenis hubungan ini dengan saling berganti.

Pertama hubungan, dalam mana negara berkuasa diatas geredja.

Di negara<sup>2</sup> Komunis, geredja sepnuhnya dikuasai oleh negara, malahan geredja dipergunakan sebagai alat propaganda dari negara.

Disamping itu ada hubungan antara negara dan geredja, dimana negara mempunjai kekuasaan atas geredja, meskipun hanja tinggal simbolis sadja. Ratu Inggeris masih mempunjai kedudukan sebagai Kepala dari „The Church of England”. Dalam nama resmi jang pandjang masih dapat dibatja, bahwa ia „Defender of the faith” pembela agama. Bishop<sup>2</sup> dari The Church of England diangkat oleh Radja.

Ketika pada tahun 1570 timbul perselisihan antara Paus Pius V dengan Ratu Elizabeth I dari Inggeris, maka Paus Pius tarik kembali penobatan jang telah dilakukan olehnya. Ini dapat diartikan, bahwa Paus membebaskan rakjat bawahan Ratu Elizabeth daripada kesetiaan kepada ratunya. Bagi orang Inggeris jang pada waktu itu menjatakan persetujuan untuk Geredja Roma, timullah satu situasi jang sangat gawat. Mereka menjadi pengchianat, kalau tidak terhadap negaranya, terhadap geredjanja. Tidak ada alternatif lainnya.

Dalam doktrine agama Katholiek memang ada suatu principe, bahwa Paus mempunjai kedaulatan atas jang berkuasa di dunia, dan principe ini tidak pernah ditjabut, sehingga kemungkinan perselisihan sematjam itu tetap masih ada.

Dalam kalangan umat Katholiek sendiri ada dua pendapat tentang hubungan geredja dan negara, jang satu bertentangan dengan Konstitusi Amerika, jang lainnya tidak.

Pertama: pendapat resmi. Pendapat ini jang paling tua. Ditahun 1864 Paus Pius IX dalam peraturannya jang berjudul Syllabus of Errors ia mengutuk perpisahan agama dan geredja. Paus menjatakan, bahwa adalah salah, djika orang berusaha untuk melepasan pelajaran umum dari pengawasan geredja, bahwa adalah salah, djika orang berpendirian, bahwa tiap orang bebas untuk mengakui dan memeluk agama jang ia pertajai. Ia menjesalkan, bahwa dibeberapa negara Katholiek, Pemerintahnja membiarkan warga-negaranya mengamalkan dengan setjara umum agamanja menurut kejakinan masing<sup>2</sup>.

Benar, kata Bishop James A. Pike, semua itu dinjatakan seabad jang lalu. Tapi dapatlah kita lupakan? Djika itu

\*) Kuliah umum diutjapkan pada pembukaan Perguruan Tinggi Sjarif Hidayatullah, Tjeribon, tanggal 22 Nopember 1961.

## TRI KOMANDO RAKJAT

Kami Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersendjata untuk pada setiap waktu dan kami akan tetapkan mendjalankan tugas-kewajiban membebaskan Irian Barat, tanah-air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda. Dan ini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah-air kita Irian Barat dengan memetjah-belah bangsa dan tanah-air Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakjat Indonesia, juga jang berada di daerah Irian-Barat untuk melaksanakan Tri-Komando sebagai berikut :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkanlah sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah-air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah-air dan bangsa.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati perdjuangan kemerdekaan Indonesia.

Jogjakarta, 19 Desember 1961  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia.

S U K A R N O  
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/  
Panglima Besar Komando Tertinggi  
Pembelaan Irian Barat.

mengenai geredja lain, mungkin dapat. Tapi kata Kepala geredja Katholiek termasuk golongan istimewa.

Ditahun 1870 Dewan Vatican menjatakan, bahwa Paus adalah berdaulat, jika ia bertindak „ex cathedra“ mengenai soal<sup>2</sup> moral dan kepertjajaan, dan geredja Katholiek mengadjarkan, bahwa pernyataan Paus Pius IX itu mengikat semua orang jang beragama Katholiek. Oleh karena itu, maka pendapat „resmi“ itu menuntut ketataan, baikpun di zaman jang sudah maupun dizaman sekarang. Begitulah pendapat resmi dari Geredja Katholiek. Disamping itu ada pendapat lain, jang oleh Bishop James A. Pike tadi dinamakan: *Tafsiran Amerika*.

The reverend John Courtney Murray, seorang ahli agama Katholiek mengemukakan bhw. pendirian Paus Pius IX, jang mengutuk perpisahan agama dan negara ditudjukan kepada suatu keadaan jang buruk, jaitu liberalisme dari abad ke-19 jang merupakan suatu antjaman bagi geredja Katholiek.

Demokrasi Amerika, kata Murray, adalah kuda jang lain warnanya. Ia pertjaja, bahwa Geredja Katholiek dapat dibawa kepada pengakuan, bahwa Amerika mempunyai tradisi sendiri, jaitu perpisahan antara agama dan negara. Tradisi Amerika itu sudah berdjalan lama, maka karena itu oleh Murray dikemukakan, apakah Geredja Katholiek di Amerika dibolehkan melalui djalan sendiri dalam lapangan hubungan agama dan negara dengan tetap taat kepada pokok<sup>2</sup> Agama Katholiek jang esentiel.

Ditahun 1948, dimana Geredja Katholiek di Roma dengan tegas menerangkan, bahwa dalam soal<sup>2</sup> „kebenaran“ dan „kesalahan“, adalah hanja Paus jang memegang kedaulatan, para bishop Katholiek di Amerika menjatakan, bahwa tradisi Amerika merupakan

kerja sama jang bebas antara pemerintah dan golongan<sup>2</sup> agama, dengan tidak ada suatu golongan jang mempunyai privilege dan tidak ada pembatasan dalam kebebasan beragama dari tiap<sup>2</sup> warganegara.

Tafsiran Amerika ini, jang didukung oleh sebagian besar umat Katholiek di Amerika tidak sesuai dengan pendapat resmi dari Roma, akan tetapi hingga sekarang belum ada tanda<sup>2</sup> bahwa Geredja Roma akan mengambil tindakan terhadap penjimpangan dari Geredja Katholiek di Amerika.

Kembali kepada tjalon Kennedy, Bishop James A. Pike menjatakan, bahwa jika Kennedy mendjundung tinggi pendirian resmi dari Geredja Roma, ia menjatakan tidak dapat menjokong pentjalanan itu. Akan tetapi, jika ia mendjundung tinggi tradisi Amerika, seperti diterangkan oleh Father Murray maka ia dapat menerima tjalon Kennedy. Semua itu dengan memperhatikan sjarat<sup>2</sup> ketjakapan jg. objectief.

Tjalon Kennedy sendiri waktu itu menerangkan, bagaimanapun agama seorang, untuk orang jang bertanggung jawab tidak ada jang lebih tinggi ketjuali sumpah dijabatan. Oleh pers dari Geredjanja, keterangan ini dikatakan bukan doktrine Katholiek jang baik.

Selain itu tjalon Kennedy pun telah mendjandikan, bahwa jika ia dipilih menjadi Presiden, ia tidak akan membuka perwakilan di Vatikanstad dan tidak akan memberi bantuan kepada sekolah<sup>2</sup> parochie. Mengenai bantuan dalam lapangan family planning kepada lain<sup>2</sup> negara, jika negara itu menghendaki, Amerika patut memberikannya.

Tradisi Amerika, jang berupa perpisahan antara agama dan negara itu, adalah tradisi jang mengikat semua

golongan agama. Golongan agama Katholiek jang merupakan minoritet di Amerika menjesuaikan diri dengan tradisi itu dan menurut Father Murray tadi meskipun menjimpang dari pendapat resmi, tapi tidak bertentangan dengan pokok<sup>2</sup> agama Katholiek jang esentiel.

Seperti telah diterangkan diatas, arti perpisahan agama dan negara, terbatas dalam soal apakah Geredja Katholiek jang mempunyai pemimpin Sentral, jaitu Paus, mempunyai otoriteit atas umatnya, jang menduduki jabatan kenegaraan. Presiden Kennedy, sebagai orang Katholiek adalah dibawah Paus sebagai kepala agama, tapi sebagai Presidan Amerika ia tidak terikat, melainkan oleh sumpah dijabatannya.

Meskipun di Amerika ada tradisi perpisahan negara dan agama, ini tidak berarti bahwa dalam penghidupan negara, agama itu didjauhkan sebanyak mungkin. Dengan tidak menjimpang dari soal tadi dalam principnya, tergantung dari sikap umatnya, apakah hubungan agama dan negara merupakan hubungan jang akrab.

Di negara kita ini ada tradisi jang baik, jang didjundung tinggi oleh Kepala Negara kita, jaitu tiap<sup>2</sup> hari besar Islam dirajakan di Istana. Suatu upatjara kenegaraan jang penting, jaitu hari proklamasi, ditutup dengan batjan do'a, oleh seorang alim "lama".

Pembangunan Mesjid dihalaman Istana merupakan hubungan jang akrab antara negara dan agama.

Di Amerika adat kebiasaan itu ada djuga. Dalam upatjara kenegaraan jg. penting, jaitu pelantikan Presiden baru, dibatjakan ajat<sup>2</sup> dari kitab Indjil. Malah ada lagi satu kebiasaan, jang kita di Indonesia belum memilikinya. Di Amerika tiap<sup>2</sup> sidang dari Badan Perwakilan, baikpun di Pusat, maupun dinegara bagian, dibuka dengan sembahjang atau do'a. Ada seorang pendeta, chusus jang dibajar oleh negara jang tugasnya memimpin do'a pada waktu membuka sidang badan perwakilan itu. Senaat Amerika di Washington, mempunyai „the Chaplain of the Senate“. Salah seorang Chaplain jang bernama Peter Marshall, adalah orang jang tersohor, jang sesudah itu meninggal, kisah hidupnya dikarangkan dalam buku oleh isterinya dengan djudul : „A man called Peter“. Kisah ini sudah didjadikan film dan sudah pula dipertundukkan di tanah air kita. Sidang<sup>2</sup> dari badan<sup>2</sup> perwakilan kita baikpun di pusat maupun di daerah belum ada jang dibuka dengan pembatjaan Qur'an atau dengan do'a (1). Shalawat dan Salam atas sekalian pesuruh Tuhan". Kemudian diiringi dengan do'a mudah<sup>2</sup>an sidang ini diberi pertundjuk, taufiq dan hidayah oleh Tuhan kepada djalan jang benar".

Dengan bahasa Melaju dan Inggeris. (Red).

Amin!

(1) Di Persekutuan Tanah Melaju, pembukaan sidang parlement dimulai dengan : „Dengan nama Allah, Tuhan Jang Maha Pengasih dan Pemurah : Shalawat dan salam atas sekalian pesuruh Tuhan. „Kemudian diiringi dengan do'a mudah<sup>2</sup>an sidang ini diberi pertundjuk, taufiq dan hidayah oleh Tuhan kepada djalan jang benar".

Red.)

Ketika do'a dibatjakan, semua berdiri dengan chidmat. Setelah selesai Ketua (speaker) memukulkan palunja dan pembitjaraannja-pun dimulai.

Berkenaan dengan Geredja Katholieck, maka dapat digambarkan ada dua princip mengenai hubungan antara negara dan agama. Tapi djika kita pikirkan lebih lanjut, bahwa pada achirnya agama itu adalah pedoman bagi manusia dan negara itu tempat hidup manusia untuk mentjapai kesempurnaan, maka dalam diri seseorang, agama dan negara itu tidak dapat terpisah. Hubungan itu dengan kata jang sulit tapi djelas dapat kita batja dalam tanja djawab, jang dilangsungkan antara korresponden News Week, Cortis G. Pepper dengan seorang Jesuit Amerika William van Roo. (News Week 21 Des. 1959).

Tanja : Apakah akan mendjadi suatu persoalan, djika seorang Katholieck mendjadi Presiden dari Amerika Serikat?

Djawab : Tidak.

Tanja : Bagaimana Geredja Katholieck mendudukkan kesetiaan seorang Presiden Amerika jang beragama Katholieck?

Djawab : Geredja Katholieck memandang ia sebagai seorang warga negara dan petugas Amerika, jang diikat oleh tugas sutji untuk mentjin-tai dan berbakti kepada negaranja, dan untuk mendiundjung tinggi hukumnya sesuai dengan kejakinanja. Ini kewaduhan moril jang dipikul oleh semua warga negara dan petugas, dan dalam ini tidak ada sesuatu jang chusus untuk orang Katholieck. Selandjutnya untuk mendjawab jang mungkin chusus dalam pertanyaan ini : orang Katholieck tidak memiliki kesetiaan jang ter-bagi<sup>2</sup>, tidak memiliki dwi kewarga-negaraan.

Tanja : Apakah Geredja Katholieck mengharap dari seorang Presiden jang beragama Katholieck, bahwa ia mempertimbangkan „doctrine“ dalam keputusannya?

Djawab : Kalau „doctrine“ disini berarti pelajaran agama tentang hukum dari Tuhan, maka pertanyaan ini harus didjawab, ja.

Seorang Presiden jang beragama Katholieck atau agama apa sadja harus berbuat sesuai dengan kejakinanja. Sebab bagi tiap<sup>2</sup> orang jang beragama, ini berarti berbuat, sesuai dengan jang ia pandang benar menurut hukum Tuhan.

Tanja : Djika timbul suatu pertentangan antara kepentingan umum Amerika dengan pelajaran agama, mana jang harus didahulukan?

Djawab : Pertanyaan ini untuk saja ragu<sup>2</sup>. Saja artikan bahwa ada suatu pertentangan dalam kejakinan seseorang Presiden Amerika jang beragama Katholieck. Djika demikian maksud pertanyaan itu, maka saja rasa ini mengenai suatu perumpamaan jang mustahil. Dalam kejakinan seorang Katholieck atau seorang jang beragama apapun, tidak mungkin ada suatu pertentangan sematjam itu. Apa sebabnya? Marilah kita artikan „dogma“ dalam hal ini „hukum moril dari Tuhan“ jang diilhamkan menurut sesuatu geredja.

Kedua, marilah kita misalkan ada suatu masjarakat, dalam masa orang sedang berbeda paham mengenai hukum itu, ditafsirkan berbeda<sup>2</sup> me-

nurut agama masing<sup>2</sup>.

Sudah barang tentu antara orang<sup>2</sup> itu akan timbul pertentangan jang hebat tentang apa jang dipandang kepentingan umum Amerika dalam suatu keadaan chusus. Akan tetapi tiap<sup>2</sup> orang, apakah ia beragama Katholieck atau agama lain, harus berpegang teguh kepada pendirian, bahwa berbuat benar menurut kejakinanja berarti memperdjoangkan kepentingan dari negaranja jang sebaiknya. Dalam negara demokrasi timbulnya suatu pertentangan paham jang hebat adalah suatu hal jang biasa. Akan mendjadi suatu kedjangalan, kalau kita memandang salah satu dari pandangan itu merupakan „kepentingan umum Amerika“ dan menganggap djika seorang Katholieck menentang pendapat itu berdasar atas kejakinanja, ia bertentangan dengan kepentingan umum Amerika.

Melakukan diskriminasi sematjam itu terhadap kebebasan berfikir bagi orang Katholieck dalam penghidupan Amerika berarti tidak adil, tidak demokratis dan tidak sesuai dengan kepribadian Amerika. Diskriminasi itu dapat dimulai dengan pertjobaan untuk menentang dan menolak pentjalanan seorang Katholieck untuk suatu kedudukan jang tinggi. Djika ini diteruskan dengan konsekwensi, maka akan berarti mengetjualikan orang Katholieck tidak hanja dari pentjalanan Presiden, tapi dari tiap jabatan jang dipilih dan achirnya dari hak memilih.

#### Soal perpisahan negara dan agama dalam dunia Islam.

Dalam riwayat dunia Islam dimasa jang lampau soal ini tidak pernah menggerakkan ummat, sehingga menimbulkan perpeleahan dan peperangan seperti didunia Barat. Pada umumnya ummat Islam tidak dapat menerima pendirian perpisahan agama dan negara. Agama adalah pedoman jang datangnya dari Tuhan, jang tidak boleh dipisahkan dari penghidupan negara. Tjelakalah negara jang penghidupannya didjauhkan dari pelajaran<sup>2</sup> agama.

Orang jang sedang menduduksi tempat jang bertanggung djawab di negara, djangan djuga mendjauhkan diri dari pelajaran agama. Dalam arti jang demikian, maka dalam diri seorang, terutama orang jang memikul tugas, negara dan agama, atau lebih djelas kejakinanja dan kesadarannya jang dipupuk oleh agamanja, tidak mungkin dipisahkan.

Berkenaan dengan hubungan antara negara dan agama. Islam dengan tegas memberi fungsi kepada masing<sup>2</sup>, sehingga karena itu dalam riwayat ummat Islam tidak ada kesulitan<sup>2</sup> jang besar seperti didunia Barat.

Agama Islam mengajarkan bahwa peladiarannya menjadi pedoman bagi manusia dalam semua tingkatan penghidupan. hidup perseorangan, hidup kekeluargaan, perkampungan, kenegaraan dan antar-kenegaraan.

Adapun mengenai kekuasaan, bagi tiap<sup>2</sup>nya diberi fungsi jang tegas pembagiannya. Dalam agama, menurut Islam, jang berdaulat adalah hania Tuhan. Dengan melalui Wahyu Ilahi ia memberikan FirmanNja, Al Qur'an, kenada ummat manusia. Ia mengangkat seorang Rasul, jaitu Nabi Muhammad Clm. untuk menjampaikan Fir-

manNja dan untuk melaksanakan perintahNja.

Muhammad jang menjadi Rasul dan bertugas untuk mempraktikkan adjaran agama Islam dalam masa 23 tahun berhasil mendirikan suatu masjarakat berdasar atas adjaran<sup>2</sup> Agama Islam, suatu masjarakat jang telah memenuhi sjarat modern seperti zaman sekarang. Dalam masjarakat jang ia tumbuhan itu, ia menjadi kepala negara, seperti kita kenal dinegara jang modern. Dalam perkembangan itu maka kita lihat Muhammad menduduksi tempat jang unik jang hanja bertemu pada Muhammad sadja, dan tidak pada siapapun djuga. Ia rasul jang diangkat oleh Tuhan, ia Kepala Negara berdasar atas pertumbuhan dan penerimaan rakjat.

Penghidupan Muhammad, apa jang ia lakukan dan katakan, dalam melaksanakan tugasnya, terkumpul dengan sangat teliti dan sempurna dan tersimpan sudah ber-abad<sup>2</sup> dan akan tersimpan dimasa jang akan datang, sebagai teladan untuk ummat Islam.

Sunnah Nabi menjadi sumber tersendiri bagi ummat Islam disamping Qur'an, dan tidak ada kekuasaan lain, jang mempunjai otoriteit dalam soal<sup>2</sup> kepertjajaan.

Waktu Nabi meninggal dunia maka timbul keharusan untuk mengantinya, akan tetapi tidak sebagai Rasul, karena dengan tegas Muhammad dalam Al-Qur'an disebut penutup Rasul. Jang ada keharusan untuk diganti adalah Muhammad sebagai Kepala Negara tidak sebagai Rasul.

Maka dengan demikianlah sangat tegas diatur dalam Agama Islam lapangan masing<sup>2</sup>. Djika sesuatu mengenai kepertjajaan maka orang kembali ke Qur'an dan Sunnah. Hanja dua sumber ini jang mempunjai otoriteit otentik, jang mengikat semua orang Muslim jang pertjaja.

Karya ulama<sup>2</sup> jang besar<sup>2</sup>, mazhab<sup>2</sup> berarti mendjelaskan dan memberi pengertian dari dua sumber.

Wenang pengganti Muhammad sebagai Kepala Negara atau Chalif, tidak boleh memasuki wewenang dari kedua sumber hukum tadi dan sebagai orang Muslim Chalif atau apa namanja pun dalam perkembangan ketatanegaraan dari zaman ke zaman, ia akan berpedoman kepada pelajaran agamanja. Perintahnja, atau pengaturannya mengikat warga-negara, djika memenuhi siarat<sup>2</sup> menurut hukum jang mendiadi dasar negara atas musjawarah bersama.

Ditahun 1953 kedjaksaan Agung mengeluarkan surat edaran, jang berisi larangan membitjarkan soal<sup>2</sup> politik di mesjid. Surat edaran menimbulkan protest dikalangan Ummat Islam jang luas sekali.

Larangan jang demikian itu terutama suatu kesulitan jang besar bagi para Chatib, jang tiap<sup>2</sup> hari Djum'at harus berchotbah dihadapan djemaah Islam. Sukar benar untuk menegaskan apa jang termasuk soal<sup>2</sup> politik apa jang tidak. Tapi terang kewadiiban Chatib adalah memberi Chotbah bagi djemaah jang berguna tidak sadja bagi penghidupan Ummat pada saat sekarang, djuga buat hari kemudian. Chatib akan kurang dalam menunaikan tugasnya, djika ia tidak meniinggung soal<sup>2</sup> jang sedang dihadapi oleh ummatnya. Dapatkah politik dihindarkan

# TAFSIR AL-QUR'AN

Semendjak Mesjid Agung „Al-Azhar” diramaikan dan ibadat didalamnya digembirakan, maka salah satu diantara amal-ibadat itu ialah mengadji Tafsir Al-Qur'an sesudah sembahjang subuh. Selesai sadja mengerdahkan sembahjang subuh berdjama'ah, diiringi oleh wirid dan do'a jang ma'stur dari Nabi Muhammad s.a.w., dibentuklah halakah dan berkelilinglah para djama'ah, laki<sup>2</sup> dan perempuan dan dibukalah pengadilan tafsir.

Telah berlaku kebiasaan baik ini beberapa waktu lamanja. Tetapi kian lama kian terasalah pentingnya penafsiran itu dikumpulkan, djangan sampai hilang sadja dibawa angin, jang kadang<sup>2</sup> djama'ah merasa amat penting dan pajah mengulanginya kembali. Lalu diadakanlah persediaan tape-recorder. Setiap penafsiran itupun ditampunglah dengan pita tape-recorder. Dan setelah madjallah „Gema Islam” ini terbit, banjak pulalah usul supaja barangmana jang telah selesai ditafsirkan, dimuat menempati ruangan jang chas dalam madjallah ini, supaja lebih rata manfaatnya.

Sungguh mundur madju saja mengabulkan permintaan itu, karena ada beberapa kesulitan jang harus diatasi. Kesulitan jang pertama ialas soal huruf Al-Qur'an. Dalam hal jang tidak mengenai dasar, (prinsip), amat djugalah saja bertolak angsur, sebagaimana jang saja atau pengarang lain biasa melakukan, jaitu dipakai sadja huruf Latyn. Tetapi kalau sudah mengenai pengertian Al-Qur'an itu sendiri, termasuklah rasanja kepada me-njia<sup>2</sup>kan agama kalau kita masih memakai huruf jang bukan hurufnya. Sungguh<sup>2</sup> huruf Al-Qur'an tidak dapat dilengkapi oleh huruf Latyn, meskipun para orientalist telah mentjari kesepekan dan istilah<sup>2</sup> dalam penggantian huruf itu. Padahal istilah pemakaian huruf Latyn untuk pengganti huruf Arab jang digariskan oleh Departemen Agama dengan jang digariskan oleh Kementerian P.D.K. (Dahulu P.P.K.) pun tidaklah sama. Apatah lagi pula pemakaian huruf Latyn dengan tanda<sup>2</sup> edjaan jang dipakai oleh Ophysen dahulu, jang ada mendekati sedikit kepada kehendak machradj huruf Arab, setelah diganti dengan Edjaan Soewandi sudahlah amat diauh dari penggambaran kehendak bahasa Arab.

Maka tidak ada lain djalan, kalau dalam madjallah ini hendak dimuat Tafsir Al-Qur'an, hendaklah ajat<sup>2</sup> dan hadist dilengkapi dengan huruf Arab sendiri, dan dibawahnja langsung ditulis ma'na atau ertinja sekali. Sedang Pertjetakan tempat mentjetak madjallah ini tidak pula bersedia huruf Arab.

Kesulitan itu telah dapat diatasi, karena para Redaksi dan Tata-Utaha

madjallah ini bersedia mengkelisekan ajat<sup>2</sup> dan hadist<sup>2</sup> itu. Oleh karena kesulitan itu telah dapat diatasi, berse-dialah saja mengabulkan permintaan itu.

## Terdjemah dan Tafsir.

Ulama Islam diseluruh dunia ini, sampai sekarang masih sepandapat bahwa Al-Qur'an sukar sekali diterjemahkan kedalam bahasa lain. Bahasa Arab mempunjai kaedah sendiri dan gaja bahasa sendiri. Al-Qur'an sebagai tiang agung dari bahasa Arab, jang menjebabkan dia menjadi satu<sup>2</sup>nja bahasa jang tetap hidup, walaupun telah banjak perobahan zaman, sukarlah diterjemahkan kedalam bahasa jang lain. Kadang<sup>2</sup> ada susunan bahasa jang amat indah menurut asli bahasa Arabnya, apabila telah diterjemah kedalam bahasa lain, hilang keindahan itu. Dituruti menurut aslinja (letter-lijk) hilang keindahannya, dan ditukar menurut djalan bahasa tempat menterjemahkan, pun terasa djuga dalam hati bahwa ada jang hilang. Misalnya;

وَإِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَمَا هُنَّ بِمُحْكَمٍ عَنْهُ سُورَةُ الْأَنْجَوْنَ ۖ ۲۳

Kalau diterjemahkan menurut aslinja demikianlah buninja; „Sesungguhnya Kami, Adalah sungguh<sup>2</sup> Kami, Menghidupkan Kami dan Mematikan Kami dan Kamilah jang mempusakai sekalian”.

Dalam bahasa aslinja amatlah indah susunan itu, diperindah pula oleh dua kali ta'kid, jaitu inna dipangkal kata dan lam sebelum nahnu, tetapi kalau telah diterjemah menurut aslinja, terdapatlah kata „Kami” berulang lima kali, dan tidaklah indah buninja. Dan kalau diertikan menurut gaja dan peraturan bahasa Indonesia kita tulislah; „Sesungguhnya Kamilah jang menghidupkan dan Kami pula jang memati-kan dan kami sekalian pula jang mempusakai”.

Dari lima tinggal menjadi tiga, namun bila diselami lubuk kedua bahasa, terasa bahwa terjemahan itu belum djuga seindah jang diterjemahkan.

Diachir sekali sampai kepada kesulitan jang lebih besar, jaitu erti dan tafsir „nahnu” jaitu Kami. Dalam bahasa Melaju lama kalimat kami boleh diutjapkan oleh seorang untuk ganti aku, kalau orang itu Radja. Tetapi bagaimana menafsir dan menterdiemah „Waristuna”, sedang dia kata djama'. Apakah Allah itu „banjak”?

Oleh sebab itu maka hampir seluruh Ulama Islam menjatakan pendapat bahwa menterjemah Qur'an, adalah pekerdjaan jang amat sulit. Dan me-

nulisnya dengan huruf jang selain huruf Arabpun pekerdjaan berbahaja. Entah kalau satu kali bersidang ahli<sup>2</sup> Islam zaman modern memutuskan sendiri bagaimana bentuk huruf jang disepakati untuk penggantian huruf ashal itu.

Tetapi Ulama<sup>2</sup> Islam modern-pun betapa pentingnya penterjemahan, terutama dizaman modern ini, jang anak<sup>2</sup> Islam sendiri, karena sekian ratus tahun pendjaduhan Barat dan pendidikanja jang masuk ke-negeri<sup>2</sup> Islam, sudah amat banjak jang perlu mendapat tuntunan Qur'an.

Didalam kitab<sup>2</sup> fiqhi lama tersebut, haram hukumnya membawa mushhaf Al-Qur'an kenegeri orang kafir. Sekarang orang kafir sendiri jang telah masuk kenegeri Islam, dan bahkan lebih perlu Qur'an itu dibawa dan disiarkan kenegeri kafir, selain perlu disiarkan terlebih dahulu dalam negeri Islam sendiri, jang kian lama kian diauh dari bahasa Arab. Padahal Imam Sjafi'i dengan tegas menjatakan bahwa mempeladjari bahasa Arab adalah fardhu'ain bagi setiap Muslim, sekurangnya untuk membatja sjahadat dan membatja Fatihah untuk sembahjang. Dan tidak ada Imam lain jang memberikan bantahan kepada perntaatan Imam Sjafi'i itu.

Untuk mengatasi kesulitan penterjemahan ini, timbulah pula kesatuan pendapat Ulama, karena memang penterjemahan itu amat penting bagi kohnja Agama Islam dan penjebaran-nya, sejogianjalah pada setiap terjemah itu dituliskan Ajat aslinja dengan huruf aslinja. Gunanya ialah supaja batjaannja jang asli tetap dipeladjari oleh jang mempeladjarinja, djangan se-mata<sup>2</sup> mengetahui erti dan terjemah sadja. Kedua, kalau si penterjemah tersalah menterjemahkan, maka orang lain diberi kesempatan menegor atau merobahnja dengan mendjelas-kan ajat mana jang diterjemahkan salah itu.

Kian kita perhebat perdojoangan kita memperdalam pengaruh Islam, kita kian sampai kepada kesimpulan bahwasanya selama agama Islam ini jang kita peluk, selama itu pula kita harus mendekati balasa Arab. Tambah dekat dan tambah berpadu tambah lebih baik.

## Tafsir.

Njatalah bahwa kalau kita benar<sup>2</sup> hendak menafsirkan Al-Qur'an bahwa bahasa itu harus kita ketahui dari sumbernya. Amat berbahajalah Qur'an kita tafsirkan hanja setelah membatja penafsiran orang lain atau penterjemahan orang lain.

Sjaich Hasan Al-Banna Pembangun Al-Ichwanul Muslimun di Mesir mem-beri nasehat, kalau hendak merasai ni'mat penafsiran Qur'an, hendaklah Qur'an itu dibatja sendiri dengan tekun dan dimasukkan kehati. Dengan pembatjaan jang tekun itu, mogea

dari chotbah Chatib? Akan tetapi tidak itu sadja jang dirasakan sebagai keberatan dari ummat Islam pada waktu itu. Surat edaran itu dirasakan sebagai tjampur tangan dari kekuasaan negara dalam lapangan jang terang masuk lapangan agama. Diwaktu itu ada jang

menjatakan keberatannya dengan tja-ra demikian: Agama Islam sudah tju-kup mengatur sjarat<sup>2</sup> bagi orang jang menjadi Chatib di mesjid. Pengaturan itu diberikan oleh Qur'an dan Nabi sendiri. Mesjid hidupnya lebih dulu dari tiap<sup>2</sup> negara.